

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi di Desa Umbu Ngedo, Kabupaten Sumba Barat Daya)

Nobertus Bali Ngara^{1*}, Annisa Purwatiningsih², Agus Dwi Sasono³

^{1,2,3}Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Abstract

This research aims to analyse the implementation of community empowerment-based tourism village development policies in Umbu Ngedo Village, Southwest Sumba Regency. The research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques including structured interviews and documentation from key informants such as village heads, traditional leaders, regents, and local community members. Data analysis was performed using the Miles and Huberman model with triangulation techniques to ensure data validity. The research findings indicate that policy implementation has been successful across three key indicators: clear policy size and objectives in improving community welfare through local culture-based tourism; management of natural, human, and financial resources involving active community participation; and effective inter-organizational communication between village governments, indigenous communities, and other stakeholders. Supporting factors include strong local government support, active community involvement in every stage of development, and unique cultural tourism potential. However, there are inhibiting factors such as limited supporting infrastructure, including security facilities and street lighting. This research contributes to understanding the implementation of community-based tourism policies and provides recommendations for the sustainable development of tourism villages.

Keywords:

Policy Implementation, Tourism Villages, Community Empowerment

Article History

Received 02 September 2025

Accepted 30 April 2026

*Corresponding Author:
ahangsandro44@gmail.com

Pendahuluan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan krusial dalam struktur kebijakan yang memerlukan keterlibatan aktif antara berbagai pemangku kepentingan untuk menjalankannya secara efektif. Melalui prosedur implementasi ini, keseluruhan proses kebijakan dapat memberikan dampak signifikan terhadap tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Menurut (Sutmasa 2021), implementasi kebijakan merupakan bagian penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan baik di level nasional maupun level daerah. Kegagalan implementasi kebijakan umumnya terjadi karena dua hal utama: pertama, kebijakan tidak terimplementasikan yang berarti suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana akibat adanya keterkaitan politik, ketidakpahaman terhadap permasalahan, atau kurangnya koordinasi; kedua, implementasi yang tidak berhasil meskipun kebijakan telah dilaksanakan sesuai rencana namun menghadapi kondisi eksternal yang tidak menguntungkan seperti pergantian kekuasaan atau perpindahan posisi.

Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat melalui konsep kampung wisata telah menjadi fokus strategis pemerintah dalam meningkatkan ekonomi masyarakat lokal. Menurut (Chaerunissa and Yuniningsih 2020), kampung wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Wisata kampung memberikan pengalaman unik bagi wisatawan untuk melihat dan mengapresiasi keunikan kehidupan serta tradisi masyarakat dengan segala potensinya. (Hadi 2019) menekankan bahwa wisata kampung merupakan aset kepariwisataan berbasis potensi pedesaan dengan keunikan dan daya tarik yang dapat diberdayakan sebagai produk wisata. (Sinaga et al. 2021) mendeskripsikan bahwa kesiapan pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan berdasarkan aspek implementasi dan unsur pengembangan pariwisata menjadi hal penting untuk mendukung keberhasilan pengembangan pariwisata, yang memerlukan sinergitas antara pihak pemerintah, swasta, dan masyarakat (Irham and Tasrif 2022).

Pemberdayaan masyarakat dalam konteks pengembangan pariwisata menjadi elemen fundamental yang tidak dapat diabaikan. Menurut (Endah 2020), kegiatan pengembangan masyarakat bertujuan untuk mengembangkan kelompok tertentu di suatu daerah yang ingin dikembangkan, yang dikenal dengan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan berpusat pada rakyat sehingga rakyat berperan aktif dalam proses tersebut dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera. (Jamaluddin et al. 2019) mendefinisikan pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, mendirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang kehidupan. (Jasmin et al. 2024) menambahkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan upaya transformasi pertumbuhan masyarakat sebagai kekuatan nyata untuk melindungi dan memperjuangkan nilai-nilai serta kepentingan dalam arena kehidupan. (Permatasari 2022) menyatakan bahwa pariwisata berbasis masyarakat merupakan model ideal dalam pengembangan pariwisata sebagai masa depan bagi Indonesia.

Kabupaten Sumba Barat Daya dengan ibukotanya Tambolaka memiliki potensi pariwisata yang luar biasa dengan beranekaragam objek wisata yang masih terjaga kelestariannya. Kabupaten ini memiliki potensi bagus dalam sektor pariwisata yang setiap tahunnya turut menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan perekonomian masyarakat lokal, dengan wilayah-wilayah wisata yang telah dikenal secara nasional maupun internasional seperti kampung Ratenggaro. Desa Umbu Ngedo sebagai salah satu desa yang dikembangkan menjadi kampung wisata memerlukan implementasi kebijakan yang tepat berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata. Pengembangan desa wisata ini perlu dilakukan dalam bentuk pengembangan yang melibatkan masyarakat melalui program pariwisata yang didukung pemerintah setempat dan pelaku usaha, sehingga potensi wisata dapat terus dikembangkan dengan memberdayakan kemampuan masyarakat lokal melalui pendekatan sosial budaya maupun ekonomi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang dilakukan langsung di lokasi penelitian. Menurut (Rukajat 2018), penelitian

lapangan bertujuan mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi sosial individu, kelompok, dan masyarakat. Penelitian kualitatif dipilih karena prosedur penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari subjek yang diamati. (Djajanegara 2019) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif berusaha menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data-data yang dikumpulkan. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena bertujuan mengungkapkan fakta-fakta dari data yang dikumpulkan serta menguraikan dan menggambarkan peristiwa yang terjadi terkait implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Umbu Ngedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penetapan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa lokasi tersebut sangat tepat untuk memperoleh data yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian. Waktu penelitian dilaksanakan pada periode Maret hingga Mei 2024.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Informan dipilih berdasarkan kriteria orang yang dianggap mengetahui informasi yang dibutuhkan peneliti, meliputi anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), aparat desa, dan masyarakat sekitar Desa Umbu Ngedo. Data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pengembangan desa wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan dokumentasi. Wawancara terstruktur digunakan karena peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi yang akan diperoleh, dengan menyiapkan instrumen berupa pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Teknik dokumentasi dilakukan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, dan dokumen lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model Miles dan Huberman yang dilaksanakan secara interaktif melalui proses reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (verification). Metode berpikir induktif dipilih karena penelitian ini berangkat dari fakta-fakta khusus dan peristiwa konkrit yang kemudian ditarik generalisasi yang bersifat umum. Instrumen penelitian utama adalah peneliti sendiri yang menetapkan fokus penelitian, memilih informan, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menganalisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya. Hal ini sejalan dengan pendapat Lincoln dan Guba serta Nasution dalam (Nasir et al. 2023) yang menyatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah instrumen utama. Instrumen penunjang lainnya meliputi pedoman wawancara, catatan lapangan, dan alat bantu seperti kamera, perekam, dan alat tulis.

Keabsahan data diuji melalui empat kriteria menurut (Nasir et al. 2023), yaitu credibility (kepercayaan), transferability (keteralihan), dependability (kebergantungan), dan confirmability (kepastian). Uji kredibilitas dilakukan melalui triangulasi sumber, metode, dan waktu dengan mewawancarai informan dari berbagai elemen yang berbeda serta melakukan pendalaman melalui observasi dan dokumentasi. Transferability dipenuhi dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan sistematis dalam laporan penelitian sehingga pembaca memperoleh gambaran yang jelas tentang hasil penelitian. Dependability dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian untuk memastikan keandalan penelitian. Confirmability dilakukan dengan menguji hasil

penelitian yang dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, sehingga hasil penelitian benar-benar merupakan fungsi dari proses penelitian yang telah dilaksanakan.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Umbu Ngedo Kabupaten Sumba Barat Daya

Pemberdayaan masyarakat menjadi inti dari kebijakan ini. Melalui pelatihan dan pendampingan, warga diajak untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan wisata. Contohnya, para wanita diajarkan untuk memasarkan produk tenun ikat mereka kepada wisatawan, sementara generasi muda dilibatkan dalam pelatihan pemandu wisata lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa, sekaligus membangun rasa memiliki terhadap program pengembangan wisata yang dilakukan. Adapun indikator yang dipakai didalam Implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Umbu Ngedo Kabupaten Sumba Barat Daya yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi. Ukuran kebijakan merujuk pada indikator atau kriteria yang digunakan untuk menilai sejauh mana kebijakan yang diimplementasikan telah mencapai hasil yang diharapkan. Ukuran ini mencakup aspek kuantitatif dan kualitatif, seperti tingkat pencapaian tujuan kebijakan, dampak sosial, ekonomi, atau lingkungan, serta efisiensi dalam pelaksanaannya. Dengan adanya ukuran yang jelas, pemerintah atau pelaksana kebijakan dapat memantau, mengevaluasi, dan memperbaiki pelaksanaan kebijakan tersebut secara sistematis.

Berdasarkan wawancara dengan pihak terkait, implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Umbu Ngedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, menunjukkan beragam pandangan dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan. Secara umum, kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata berbasis budaya dan kearifan lokal, sekaligus melestarikan warisan budaya desa.

Berdasarkan hasil wawancara Kesimpulannya, kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Umbu Ngedo telah menunjukkan perkembangan yang positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata. Namun, terdapat saran untuk memperkuat aspek pelestarian budaya dan lingkungan, serta meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai ukuran keberhasilan kebijakan. Desa Umbu Ngedo memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kampung wisata berbasis budaya dan alam. Potensi tersebut meliputi keberadaan rumah adat tradisional, praktik kepercayaan Marapu, kain tenun ikat khas Sumba, serta lanskap alam yang eksotis. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya, bersama dengan komunitas lokal, telah mulai mengimplementasikan kebijakan pengembangan kampung wisata yang menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat. Langkah pertama dalam implementasi ini adalah melakukan identifikasi potensi desa, yang kemudian menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan strategis untuk menarik wisatawan sekaligus menjaga kelestarian budaya dan lingkungan. Namun, dalam pelaksanaannya, pengembangan desa wisata tidak hanya membutuhkan partisipasi masyarakat, tetapi juga harus didukung dengan payung hukum yang jelas, salah satunya melalui Peraturan Daerah (Perda) yang berlaku di Kabupaten Sumba Barat Daya. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 4 Tahun 2016 Dengan demikian, Perda No. 4 Tahun 2016 berfungsi sebagai fondasi legal dalam mengatur pengembangan desa wisata agar berjalan tertib, terarah, dan memberi manfaat bagi masyarakat. Pemberdayaan

masyarakat menjadi inti dari kebijakan ini. Melalui pelatihan dan pendampingan, warga diajak untuk aktif berpartisipasi dalam pengelolaan wisata. Contohnya, para wanita diajarkan untuk memasarkan produk tenun ikat mereka kepada wisatawan, sementara generasi muda dilibatkan dalam pelatihan pemandu wisata lokal. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa, sekaligus membangun rasa memiliki terhadap program pengembangan wisata yang dilakukan.

Sumber Daya

Sumber daya merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Sumber daya bisa bersifat alamiah, manusiawi, atau buatan, dan memiliki peran penting dalam proses produksi, pengelolaan, dan pengembangan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, atau lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Umbu Ngedo, implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Umbu Ngedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat dilihat dari berbagai aspek sumber daya yang mendukung kebijakan tersebut.



Gambar 1. Sumber Daya Yang Ada Dikampung Rotenggaro
Sumber : Data Primer 2025

Gambar 1 merupakan sumber daya sarana dan prasarana yang disediakan oleh masyarakat. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata bersinergi dengan masyarakat dalam hal menjalankan wisata berbasis kearifan lokal. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada pengelolaan yang efektif terhadap berbagai sumber daya, baik alam, manusia, keuangan, teknologi, sosial, maupun lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan wisata dan pelatihan yang memadai sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Sumber daya merujuk pada segala sesuatu yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau mencapai tujuan tertentu. Sumber daya bisa bersifat alamiah, manusiawi, atau buatan, dan memiliki peran penting dalam proses produksi, pengelolaan, dan pengembangan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti ekonomi, pendidikan, atau lingkungan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Umbu Ngedo,

implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Umbu Ngedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat dilihat dari berbagai aspek sumber daya yang mendukung kebijakan tersebut.

Implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada pengelolaan yang efektif terhadap berbagai sumber daya, baik alam, manusia, keuangan, teknologi, sosial, maupun lingkungan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahap pengembangan wisata dan pelatihan yang memadai sangat dibutuhkan untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan kebijakan ini dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata yang berbasis budaya dan kearifan lokal. Implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat, sebagaimana di Desa Umbu Ngedo, sangat dipengaruhi oleh efektivitas pengelolaan sumber daya yang tersedia: alam, manusia, keuangan, teknologi, sosial, maupun lingkungan. Hal ini sejalan dengan temuan (Sidiq and Resnawaty 2017), yang menegaskan bahwa keberhasilan program desa wisata sangat bergantung pada optimalisasi potensi lokal dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahap pengembangan.

Komunikasi Antara Organisasi

Komunikasi antar organisasi adalah proses pertukaran pesan, informasi, atau simbol antara dua organisasi atau lebih yang memiliki kepentingan, tujuan, atau aktivitas tertentu. Proses ini bisa terjadi dalam bentuk kerja sama, negosiasi, koordinasi, maupun penyelesaian konflik. Menurut teori komunikasi organisasi, interaksi ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga struktur, budaya, serta sistem yang dimiliki masing-masing organisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Umbu Ngedo, implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Umbu Ngedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat dilihat dari berbagai aspek komunikasi antara organisasi yang terlibat dalam pengembangan kebijakan ini.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Umbu Ngedo, aspek komunikasi antara organisasi, termasuk pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat setempat, memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Komunikasi yang efektif dan transparan membantu memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan kebijakan, berperan aktif dalam proses pengembangan, dan bekerja sama untuk mencapai hasil yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemberian umpan balik juga memperkuat implementasi kebijakan dan memastikan kesuksesan pengembangan kampung wisata di Desa Umbu Ngedo. Komunikasi antar organisasi adalah proses pertukaran pesan, informasi, atau simbol antara dua organisasi atau lebih yang memiliki kepentingan, tujuan, atau aktivitas tertentu. Proses ini bisa terjadi dalam bentuk kerja sama, negosiasi, koordinasi, maupun penyelesaian konflik. Menurut teori komunikasi organisasi, interaksi ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga struktur, budaya, serta sistem yang dimiliki masing-masing organisasi. Aspek komunikasi antara organisasi, termasuk pemerintah desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sektor swasta, dan masyarakat setempat, memainkan peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat. Komunikasi yang efektif dan transparan membantu memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan kebijakan, berperan aktif dalam proses pengembangan, dan bekerja sama untuk mencapai

hasil yang berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pemberian umpan balik juga memperkuat implementasi kebijakan dan memastikan kesuksesan pengembangan kampung wisata di Desa Umbu Ngedo.

Implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Umbu Ngedo, aspek komunikasi antarlembaga (pemerintah desa, LSM, sektor swasta, dan masyarakat setempat) merupakan faktor kunci keberhasilan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian (Setiadi and Pradana 2022) yang menekankan bahwa efektivitas komunikasi antaraktor dalam program desa wisata sangat menentukan sejauh mana masyarakat dapat. Jika ditinjau melalui perspektif (Maulidiah and Megawati 2022), maka implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Umbu Ngedo akan lebih efektif apabila: Komunikasi antaraktor berjalan secara terbuka, transparan, dan dua arah. Masyarakat dilibatkan dalam seluruh proses pengambilan keputusan, bukan hanya pelaksana teknis. Kolaborasi multipihak (pemerintah–LSM–swasta–masyarakat) dibangun secara setara dan sinergis. Mekanisme umpan balik dikembangkan agar masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan saran. Dengan menerapkan poin-poin tersebut, pengembangan Kampung Wisata Umbu Ngedo tidak hanya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga membangun tata kelola pariwisata berbasis komunikasi partisipatif yang berkelanjutan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengembangan Kampung Wisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Umbu Ngedo Kabupaten Sumba Barat Daya

Dukungan pemerintah daerah dapat dipahami sebagai segala bentuk komitmen, kebijakan, fasilitas, serta tindakan nyata yang diberikan oleh pemerintah tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) untuk mendorong keberhasilan suatu program atau kebijakan publik. Dukungan ini bisa berupa regulasi, pendanaan, pembinaan, penyediaan sarana prasarana, hingga pendampingan teknis. Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan aspirasi mereka, sehingga dukungan pemerintah daerah menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik.

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa Keterlibatan masyarakat sangat kuat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Masyarakat dilibatkan dalam musyawarah desa, pembangunan infrastruktur, hingga pengelolaan kegiatan wisata. Masyarakat adat menekankan partisipasi yang selaras dengan pelestarian budaya. Dukungan terhadap pariwisata diberikan dengan syarat bahwa ritual, rumah adat, dan tradisi tetap dijaga maknanya. Sinergi pemerintah desa dan lembaga adat berhasil menciptakan ruang partisipasi yang luas, sehingga masyarakat merasa menjadi subjek, bukan sekadar objek pembangunan.

Faktor penghambat adalah segala bentuk kondisi, keadaan, atau variabel yang dapat mengurangi efektivitas, memperlambat, atau bahkan menggagalkan proses pencapaian tujuan dari suatu kebijakan, program, atau kegiatan. Faktor ini bisa berasal dari internal (dalam organisasi/masyarakat) maupun eksternal (lingkungan, regulasi, kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya). Menurut (Indah et al. 2024) dalam model implementasi kebijakan, faktor penghambat muncul ketika ada ketidaksesuaian antara kebijakan, sumber daya, komunikasi, dan kondisi sosial-

politik, sehingga implementasi tidak berjalan optimal. Berdasarkan hasil wawancara kepada pelaku wisata tentang factor penghambat berdasarkan hasil wawancara terhadap pelaku wisata tentang hambatan

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai implementasi kebijakan pengembangan kampung wisata berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Umbu Ngedo, Kabupaten Sumba Barat Daya, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah berjalan secara efektif melalui tiga indikator utama. Pertama, ukuran dan tujuan kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat dengan fokus meningkatkan kesejahteraan ekonomi melalui pariwisata berbasis budaya lokal, yang terbukti dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan dan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan pariwisata. Kedua, pengelolaan sumber daya mencakup optimalisasi sumber daya alam berupa keindahan alam dan warisan budaya, sumber daya manusia melalui pelatihan masyarakat sebagai pemandu wisata dan pengelola homestay, serta sumber daya keuangan dari dukungan pemerintah daerah dan pendapatan pariwisata. Ketiga, komunikasi antarorganisasi berjalan efektif antara pemerintah desa, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan melalui sosialisasi, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan, dan transparansi informasi.

Faktor pendukung implementasi kebijakan meliputi dukungan kuat dari pemerintah daerah dalam bentuk penyediaan infrastruktur dan pelatihan, serta keterlibatan aktif masyarakat yang merasa memiliki program pengembangan wisata dengan tetap menghormati nilai-nilai adat dan budaya setempat. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah keterbatasan infrastruktur pendukung seperti fasilitas keamanan, penerangan jalan, dan pengelolaan hewan peliharaan yang dapat mengganggu kenyamanan wisatawan. Penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan kampung wisata sangat bergantung pada sinergitas antara pemerintah, masyarakat, dan pelestarian budaya lokal untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agustin, Merry. 2016. "Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Melalui Musrenbang (Studi Kasus Pada Pembangunan Japordes Desa Tunggunjagir Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan)." *Publika* 4(1).
- Chaerunissa, Shafira Fatma, and Tri Yuniningsih. 2020. "Analisis Komponen Pengembangan Pariwisata Desa Wisata Wonolopo Kota Semarang." *Journal Of Public Policy And Management Review* 9(4):159–75.
- Djajanegara, Asep R. 2019. "Teknik Analisis Data (Analisis Kualitatif Pada Hasil Kuesioner)." *Medikom/ Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Dakwah* 1(1):55–65.
- Endah, Kiki. 2020. "Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa." *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 6(1):135–43.
- Hadi, Wisnu. 2019. "Menggali Potensi Kampung Wisata Di Kota Yogyakarta Sebagai Daya Tarik

- Wisatawan." *Journal of Tourism and Economic* 2(2):129–39.
- Indah, Vera Finidia et al. 2024. "Tantangan Dan Hambatan Dalam Implementasi Kebijakan Pembentukan Tim Renstra Di Kesbangpol Kabupaten Ogan Komering Ilir." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 7(1):99–118.
- Irham, Irham, and Tasrif Tasrif. 2022. "Strategi Komunikasi Pengembangan Pariwisata Di Kelurahan Matakando Kota Bima." *Jurnal Lensa Mutiara Komunikasi* 6(2):276–82.
- Jamaluddin, Yanhar et al. 2019. "Strategi Dan Model Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Sumatera Utara." *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)* 9(1):21–30.
- Jasmin, Putri Ramadhani et al. 2024. "Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Basis Perubahan Sosial." *Papsel Journal of Humanities and Policy* 1(4):295–304.
- Maulidiah, Nurul, and Suci Megawati. 2022. "Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Pada BUMDes Sambimadu, Desa Sambibulu, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo)." *Publika* 391–406.
- Nasir, Abdul et al. 2023. "Pendekatan Fenomenologi Dalam Penelitian Kualitatif." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3(5):4445–51.
- Permatasari, Indah. 2022. "Peran Model Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat (Community Based Tourism) Dalam Mewujudkan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Di Bali." *Kertha Wicaksana* 16(2):164–71.
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kualitatif (Qualitative Research Approach)*. Deepublish.
- Setiadi, Muhammad Bagus, and Galih Wahyu Pradana. 2022. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Melalui Program Desa Wisata Genilangit (Studi Di Desa Wisata Genilangit Kecamatan Poncol Kabupaten Magetan)." *Publika* 881–94.
- Sidiq, Ade Jafar, and Risna Resnawaty. 2017. "Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Linggarjati Kuningan, Jawa Barat." *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 4(1):38.
- Sinaga, Kariaman et al. 2021. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berbasis Pemberdayaan Masyarakat." *Publik* 8(1):79–90.
- Sutmasa, Yosep Gede. 2021. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4(1):25–36.